

GUNTINGAN BERITA

| NO DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|
| 2 | SUARA KARYA | 8 | 3-8-2002 |

Soal Penawaran Saham KPC

Sikap Gubernur Kaltim Belum Jelas

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah sampai saat ini belum menerima secara resmi penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penolakan divestasi 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Sampai saat ini kita belum terima pernyataan penolakan itu secara resmi dari Pemprov Kaltim. Pak Purnomo (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) sudah menelpon gubernur Kaltim, tapi belum bisa," kata Sekjen Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Djoko Darmono saat dicegah pers usai Sholat Jumat, di Jakarta.

Sebelumnya, PT KPC sudah menawarkan 51 persen saham divestasinya kepada pemerintah senilai 822 juta dolar AS untuk basis 100 persen saham. Terhadap 51 persen saham itu, pemerintah memutuskan sebanyak 31 persen ditawarkan untuk Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Timur, sedangkan sisanya untuk pemerintah pusat.

Menurut Djoko, penolakan itu merupakan keputusan DPRD Kaltim, sementara sikap resmi Gubernur Kaltim, Suwarna AF yang mewakili pihak esksekutif sampai sekarang belum jelas. "Yang kita baca dari media itu keputusan DPRDnya, sementara dari Gubernur Kaltim belum," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah akan menunggu jawaban terhadap penawaran tersebut karena sesuai kontrak, waktu penawaran selama tiga bulan sejak ditawarkan. "Jadi, umur penawaran itu baru tiga hari. Siapa tahu dalam tiga bulan ke depan Pemprov Kaltim sudah memberikan jawaban," katanya.

Setelah para pihak yang ditawarkan itu memberi jawaban, maka pemerintah melalui tim akan melakukan uji tuntas terhadap para peminat.

"Jadi, tiga bulan ke depan dengan Pemprov Kaltim tidak akan ada lagi negosiasi, karena pemerintah sebagai pihak yang ditawarkan 20 persen saham pun tinggal menyatakan ya atau tidak," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Kasyful Anwar As'ad sebelumnya

mengungkapkan, keputusan divestasi 51 persen saham KPC itu merugikan Kalimantan Timur.

Ia menduga sejak awal ada konspirasi antara Pemerintah Pusat dan KPC yang antara lain ditandai dengan pemerintah Pusat empat tahun lalu yang menolak untuk membeli saham KPC. "Bahkan Pemerintah Pusat pernah membantah siaran pers yang dilakukan manajemen KPC bahwa 51 persen saham akan dibagi kepada Pemprov Kaltim sebesar 31 persen dan Pemerintah Pusat (dalam hal ini PT Bukit Asam) sebesar 20 persen," katanya.

Di Sangatta, Presiden Direktur (Predir) PT KPC, Noke Kiroyan mengungkapkan, dirinya tidak punya kekuasaan untuk menghentikan pengapalan dan produksi KPC.

"Terus terang saya tidak punya kekuasaan untuk itu, dan bahkan saya tidak habis mengerti mengapa justru kepada KPC dilimpahkan sasaran itu," tandas Noke.

Menurutnya, masalah divestasi saham KPC sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM, bukan KPC lagi. Jika para pendemo bersikeras tetap menghendaki penghentian aktivitas di perusahaan itu, maka para pendemo akan berhadapan dengan aparat petugas, karena KPC adalah aset sangat berharga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalau pengapalan batu bara dihentikan, KPC dan negara akan diklaim oleh negara pembeli, dan itu berarti kerugian tidak saja akan

diderita oleh KPC, tapi juga negara termasuk juga Kaltim dan Kutim. Royalti 13,5 persen atau setara Rp 17 miliar dari hasil penjualan batu bara sebanyak 60 ribu ton dalam sekali pengapalan akan gagal diterima oleh negara.

Noke menyebutkan, dampak dari gelombang demo yang melanda KPC membuat ribuan karyawannya menjadi sangat resah, sehingga mereka (karyawan) tidak berani segera pulang sehabis jam kerja. Para karyawan yang resah tersebut baru pulang pada malam hari, setelah merasa situasi betul-betul aman.

Di Jakarta, Manajer Humas KPC, Nunik Maharani Maulana mengatakan, hingga saat ini produksi batu bara KPC tetap berjalan normal. "Kami sudah menerima surat dari DPRD masalah penghentian tersebut. Namun KPC masih bisa beroperasi," ujarnya.

Ia mengatakan, memang ada gerakan yang dilakukan oleh sekitar 500 orang yang berasal dari Bontang dan Samarinda ingin memblokir tempat KPC beroperasi. Namun menurutnya, KPC sudah mempersiapkan aparat untuk bersiaga sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang mengganggu proses produksi.

Presdir KPC sudah membicarakan dengan pihak DPRD sekitar penawaran saham tersebut, namun mereka tetap menyatakan tidak bisa menerima keputusan pemerintah yang memberi 31 persen saham KPC kepada Pemda dan sisanya untuk pemerintah pusat.

(KH-2/Ant)